

**IMPACT AND EFFICIENCY OF LABOR-INTENSIVE PROGRAMS AS A  
PRIORITY EXPENDITURE TO ALLEVIATE UNEMPLOYMENT: A  
LITERATURE REVIEW**

**DAMPAK DAN EFISIENSI PROGRAM PADAT KARYA SEBAGAI BELANJA  
PRIORITAS UNTUK MENGENTASKAN PENGANGGURAN: KAJIAN  
LITERATUR**

**Kumba Digdowiseiso<sup>1</sup>, Aisyah Fitasari<sup>2</sup>, Nastiyawati<sup>3</sup>**  
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta<sup>1,2,3</sup>  
[kumba.digdo@civitas.unas.ac.id](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)

**ABSTRACT**

*Labor-intensive programs have become one of the policy instruments used by the Indonesian government in an effort to overcome unemployment and encourage economic growth. This study aims to analyze the impact and efficiency of labor-intensive programs as priority spending in alleviating unemployment, the indicators used in this study are the Open Unemployment Rate (TPT), government program spending, and the level of labor absorption. This research uses descriptive qualitative method with literature study through collecting information from various sources. The results show that labor-intensive programs have a positive impact in reducing the unemployment rate in Indonesia. The program is able to create new jobs especially in labor-intensive sectors such as infrastructure development and public works. In addition, the program also provides employment opportunities for vulnerable and marginalized groups of society, such as low-skilled workers and those living in economically disadvantaged areas. This contributes to reducing social inequality and increasing social inclusion. However, challenges remain, such as the potential for temporary employment that can lead to income instability and the lack of long-term job security. In addition, the program still lacks efficiency in budget realization for optimal resource allocation and maximum results.*

**Keywords:** *Labor-intensive program; unemployment; PEN; efficiency; impact*

**ABSTRAK**

Program padat karya telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan efisiensi program padat karya sebagai belanja prioritas dalam mengentaskan pengangguran, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), belanja program pemerintah, tingkat serapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program padat karya memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru terutama di sektor-sektor padat karya seperti pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti pekerja berketerampilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung secara ekonomi. Hal ini memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan

inklusi sosial. Akan tetapi masih terdapat tantangan yaitu adanya potensi pekerjaan sementara yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya jaminan pekerjaan jangka panjang. Selain itu, efisiensi program masih kurang efisien dalam realisasi anggaran untuk alokasi sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal.

**Kata Kunci:** Program padat karya; pengangguran; PEN; efisiensi; Dampak

## PENDAHULUAN

Pengangguran masih menjadi masalah yang cukup sulit di banyak negara, termasuk Indonesia. salah satu penyebabnya adalah lambatnya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Julihandono (2023) mengatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimulai sejak Pandemi Covid-19 yang telah melanda negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. berbagai dampak negatif Pandemi Covid-19 yang ditimbulkan tidak hanya terdapat pada sektor kesehatan, tetapi juga melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak lanjutan adanya kebijakan pembatasan sosial (Julihandono, 2023)

Salah satu dampak yang sangat terasa adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar yang membatasi akses mobilitas keluar-masuk manusia dan barang di berbagai daerah (Perdana dan Susanto, 2021). Pembatasan Sosial sebagai cara untuk membatasi penyebaran virus corona ini yang menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan bagi beberapa perusahaan sehingga berujung pada perampangan organisasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Utama dan Setiawan, 2021). Dikutip dari Cnbcindonesia.com Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 tercatat mengalami kenaikan hingga 2,56 juta penduduk, sedangkan masyarakat bekerja yang dikurangi jam kerjanya mengalami kenaikan hingga mencapai 24,03 juta penduduk (www.cnbcindonesia.com). Jumlah

tersebut mengalami penurunan, tercatat pada bulan Agustus 2021 jumlah pengangguran telah mengalami penurunan hingga menjadi 1,82 juta penduduk, dan masyarakat bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja mengalami penurunan hingga menjadi 17,41 juta penduduk (www.cnbcindonesia.com).

Di sisi lain, Pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menciptakan *good governance*. *Good governance* dapat terwujud dengan menciptakan sistem pemerintahan dan tata kelola yang baik. Indikator tata pemerintahan yang baik dinilai dalam kinerja pemerintah dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, daya tanggap, partisipasi dan transparansi (Anjasmara dan Digdowiseiso, 2023).

Pada situasi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, strategi untuk mewujudkan *good governance* pemerintah Indonesia tentu berbeda. Krisis diberbagai bidang yang dialami mengharuskan pemerintah memberlakukan strategi praktis dengan melakukan *refocusing activity* atau memfokuskan kembali kegiatan dan realokasi anggaran sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan. *Refocusing* kegiatan ini telah ditekankan dalam instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Kuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Sabana et al., 2023). Pemerintah Pusat melakukan refocusing kegiatan dengan merealokasikan anggaran yang besar pada kegiatan peningkatan perekonomian, peningkatan dibidang Kesehatan, serta Pendidikan. Alokasi anggaran pemerintah memiliki fungsi stabilisasi. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas perekonomian negara seperti mempertahankan dan mencapai kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik (Digidowiseiso, 2015). Selama krisis Pandemi Covid-19 masih berlangsung, pemerintah memiliki kewajiban untuk meminimalisir dampak negatif, dan menerapkan berbagai Langkah kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut demi menciptakan *good governance* dikala pandemi.

Berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, dan salah satu pendekatan yang telah mendapatkan perhatian adalah pemanfaatan program padat karya (Rizal dan Fitriani, 2023). Program-program ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor padat karya seperti pembangunan infrastruktur, konstruksi, dan pekerjaan umum (Setiawan dan Hartono, 2022). Menurut Prasetyo dan Wijaya (2021) program padat karya adalah mengalihkan pekerjaan pada tenaga kerja manusia dari mesin-mesin padat modal. Tujuannya adalah untuk merangsang penciptaan lapangan kerja, terutama untuk pekerja berketerampilan rendah yang menghadapi kesulitan dalam mencari peluang kerja (Wijaya

dan Setiawan, 2020). Diharapkan dengan mengalokasikan belanja pada sektor-sektor padat karya, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Program-program yang dilakukan pemerintah ini pun perlu diawasi implementasinya untuk memastikan keberhasilannya. Untuk itu pemerintah perlu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka untuk mengawasi keberjalanan program dan sebagai *guideline* implementasi realokasi anggaran dan *refocusing activity* ini agar berjalan menuju arah yang diinginkan. SPIP ini telah diatur dalam UU No. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian disusul dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Kabunggul et al., 2023). Sistem pengendalian internal adalah proses tetap dari Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu baik oleh manajemen maupun semua pemerintah melalui konerja yang efektif dan efisien, *reliability* pelaporan keuangan dan memastikan keamanan yang cukup untuk mencapai tujuan (Kabunggul et al., 2023). SPIP ini perlu diterapkan dalam setiap program pemerintah demi mewujudkan perekonomian negara yang stabil, termasuk dalam program padat karya.

Julihandono (2023) mengatakan program padat karya efektif mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. program ini telah menyerap tenaga kerja sesuai target, namun program ini kurang efisien karena telah menghabiskan anggaran belanja pemerintah yang besar. Di sejumlah daerah terdampak Pandemi Covid-19 pemerintah daerah telah mengeluarkan lebih dari 90% pagu

anggaran belanja prioritas program padat karya, akan tetapi masih mengalami berbagai kendala (Julihandono, 2023). Menurut Suharto dan Murniati (2019) program padat karya di Indonesia telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. (Adhikari dan Kaliyaperumal, 2020) Dampak positif program padat karya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan di antara kelompok-kelompok marjinal di Indonesia. Yusuf dan Sumardjo (2018) Menyatakan program padat karya bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, sehingga mendorong distribusi kesempatan kerja yang lebih merata. Wahyuni dan Susilawati (2021) menyatakan efisiensi program padat karya dilihat berdasarkan faktor-faktor seperti efektivitas biaya, produktivitas, dan kualitas pekerjaan.

Penelitian itu mengungkapkan bahwa program padat karya di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam hal efisiensi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas biaya, produktivitas, dan kualitas pekerjaan (Wahyuni dan Susilawati, 2021). Menurut studi Pratama dan Kusuma (2022) Program padat karya berkontribusi pada pengembangan keterampilan yang diperlukan di antara para pekerja, sehingga meningkatkan kelayakan kerja dan prospek jangka panjang mereka di pasar kerja. Akan tetapi masih terdapat tantangan seperti peningkatan biaya penerapan protokol kesehatan dan keselamatan, penurunan produktivitas karena gangguan dalam alur kerja, dan potensi kompromi dalam kualitas pekerjaan (Sari dan Pratama, 2022).

Beberapa tantangan lain misalnya peningkatan biaya operasional, potensi rendahnya kualitas hasil kerja (Setiawan dan Wibowo, 2023) menjadikan alokasi belanja pemerintah untuk program padat karya ini kurang efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program-program tersebut terhadap pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, Penelitian ini juga mengeksplorasi efisiensi program-program tersebut dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dengan pengumpulan informasi berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Julihandono (2023), sumber lain yang juga digunakan berasal dari sumber-sumber resmi, serta dari berita resmi melalui media daring.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review untuk menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti informasi tekstual, wawancara, observasi, dan dokumen (Creswell, 2013) sedangkan studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan peninjauan dan analisis literatur ilmiah yang ada tentang topik tertentu (Hart, 1998). Metode ini bertujuan untuk meringkas dan mensintesis temuan, teori, dan konsep dari berbagai sumber yang dipublikasikan, seperti buku, artikel jurnal, dan disertasi (Cooper, 2021). Studi literatur memainkan peran penting dalam proses penelitian dengan

memberikan dasar pengetahuan, mengidentifikasi kesenjangan dan tren dalam literatur yang ada, dan menginformasikan pengembangan pertanyaan penelitian dan hipotesis (Machi dan McEvoy, 2016).

Pengumpulan informasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber baik artikel ilmiah, berita resmi, dan data-data yang berasal dari sumber resmi melalui media online sebagai referensi. Referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Julihandono (2023) tentang Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Masa Pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi secara terperinci tentang dampak dan efisiensi program padat karya sebagai belanja prioritas untuk mengentaskan pengangguran. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat empiris.

Teknik ini Mengumpulkan informasi-informasi dari sumber-sumber yang relevan dan terpercaya, termasuk penelitian sebelumnya, sebagai data pendukung yang mendukung analisis dan pembahasan yang dilakukan (Julihandono, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dikutip dari pen.kemenkeu.go.id Covid-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, China dan telah menyebar hampir ke seluruh negara-negara. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia ditemukan pada 02 Maret 2020, kemudian menyebar dengan cepat ke 34 provinsi. Kemudian pada 11 Maret 2020 Covid-19 telah resmi diumumkan sebagai Pandemi global oleh *World Health Organisation* (WHO). Akumulasi kasus infeksi Covid-19 di

Indonesia hingga 2 juli 2021 mencapai 2.228.938 kasus, di antaranya 1.901.865 (83% total kasus) pasien telah dinyatakan sembuh dan 59.534 (3,4% total kasus) pasien meninggal dunia (Maria, 2022). Infeksi virus Corona masih terus mengalami peningkatan, pada Desember 2022 total akumulasi Infeksi kasus virus corona di Indonesia telah bertambah hingga 6.718.775 orang, dengan 6.544.228 orang dinyatakan sembuh, dan 160.583 jiwa dinyatakan meninggal (Lidya, 2021).

Pemerintah Negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani Pandemi global ini. Berbagai upaya dilaksanakan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa, misalnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM, dan *travel ban* untuk meminimalisir mobilisasi dan interaksi sosial masyarakat baik didalam, maupun dari luar – ke dalam negeri (Kementerian Keuangan RI, 2021). Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus semakin meluas.

Pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesehatan, sosial, pendidikan, serta ekonomi global. Pembatasan-pembatasan seperti karantina wilayah, larangan bepergian, dan langkah-langkah pembatasan sosial mengakibatkan konsekuensi, utamanya di bidang ekonomi yang signifikan (Baker et al., 2020). Hal ini menyebabkan penutupan bisnis secara masif, gangguan rantai pasokan, dan berkurangnya belanja konsumen sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan, penurunan aktivitas ekonomi, dan tekanan keuangan di berbagai sektor (Baker et al., 2020).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Baldwin dan Weder (2020) dan McKibbin dan Fernando (2020) juga menyatakan hasil yang sama bahwa Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi ekonomi yang signifikan di seluruh dunia. Langkah-langkah pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus, seperti lockdown dan larangan bepergian, berdampak langsung pada sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak. Penutupan bisnis, penurunan permintaan konsumen, dan ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam dan peningkatan tingkat pengangguran (Baldwin dan Weder, 2020).

Negara Indonesia juga mengalami dampak krisis ekonomi serupa. Salah satu dampak yang sangat terasa adalah meningkatnya jumlah pengangguran.

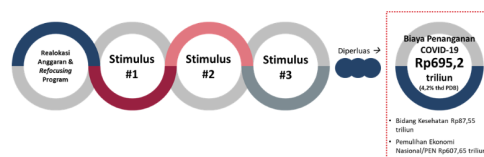
**Tabel 1. Jumlah Pengangguran Terbuka Indonesia**

Tahun	Tingkat Pengangguran	Jumlah Pengangguran
	Terbuka	
2019	5,28%	7,05 Juta Orang
2020	7,07%	9,77 Juta Orang
2021	6,49%	9,1 Juta Orang
2022	5,86%	8,42 Juta Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah penulis

Sebelum Pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia pada tahun 2019, jumlah pengangguran terbuka masih di kisaran angka 7,05 juta orang. Pada bulan maret kasus Covid-19 mulai ditemukan dan menyebar secara masif ke 34 provinsi di Indonesia. bersamaan dengan hal itu, jumlah pengangguran terbuka di Negara Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 2,72 juta orang hingga mencapai angka tertinggi yaitu 9,77 Juta Orang. Hal ini disebabkan karena dampak Pandemi menyebabkan rantai pasokan terganggu, perusahaan tidak dapat beroperasi karena kebijakan phisycal distancing, dan penurunan

daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok serta banyaknya karyawan yang dirumahkan, bahkan PHK untuk meminimalisir biaya operasional usaha. Sebagian besar pengangguran tersebut berasal dari sektor-sektor yang terdampak parah akibat Covid-19, seperti industri hiburan, akomodasi, transportasi, perdagangan dan manufaktur. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini adalah salah satu alasan yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan melakukan *refocusing* kebijakan dan realokasi anggaran. Kemudian *refocusing* kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional ini dilakukan pada enam sektor meliputi bidang Kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan peraturan dan kelembagaan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, serta insentif usaha (Digdowiseiso et al., 2023).



**Gambar 1. Skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Sumber : Kementerian Keuangan (2020)

PEN merupakan program yang mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan stimulus dan pendanaan untuk penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2021). dengan mempertimbangkan berbagai hal, biaya penanganan Covid-19 mengalami peningkatan menjadi Rp.695,2 Triliun. Anggaran tersebut kemudian dibagi kedalam enam sektor,

salah satunya adalah PEN Sektor K/L dan Pemda yang mendapat total anggaran sebesar Rp.106,11 Triliun. Ada tujuh program yang direncanakan mendapat stimulus dan pendanaan yaitu:

**Tabel 2. Program PEN-Pemerintah Daerah dan Sektor Kementerian Lembaga**

No.	Program	Anggaran
1.	Program Padat Karya Kementerian Lembaga	Rp. 18,44 T
2.	Insentif Perumahan	Rp. 1,30 T
3.	Pariwisata	Rp. 3,80 T
4.	DID Pemulihan Ekonomi	Rp. 5,00 T
5.	Cadangan DAK Fisik	Rp. 8,70 T
6.	Fasilitas Pinjaman Daerah	Rp. 10,00 T
7.	Cadangan Perluasan	Rp. 58, 87 T

Sumber : Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis

Dari ketujuh program tersebut, program padat karya menjadi salah satu program dengan pendanaan paling besar. Sejak Pandemi Covid-19 mulai menyebar, Indonesia menghadapi krisis yang serius dalam peningkatan pengangguran yang terjadi akibat dampak ekonomi Pandemi Covid-19. Program padat karya mengacu pada jenis strategi pembangunan ekonomi atau proyek yang sangat bergantung pada tenaga kerja manual dan mempekerjakan sejumlah besar pekerja. Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja, terutama di sektor-sektor di mana tenaga kerja melimpah dan tingkat pengangguran tinggi (World Bank, 2020).

Program padat karya sering kali melibatkan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, proyek konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Program-program ini dirancang untuk memberikan peluang pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan angkatan kerja yang tersedia (World Bank, 2020). Program ini menjadi pilihan terbaik

dalam mengurangi masalah peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 hingga saat ini dan meningkatkan angkatan kerja Indonesia. program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Julihandono (2023) menyatakan semua kementerian lembaga turut serta melaksanakan program padat karya dengan tujuan untuk membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun yang belum mendapat pekerjaan untuk mendapat penghasilan. Program padat karya ini telah dilaksanakan oleh enam kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Efisiensi Program Pemulihan Nasional (PEN) Program Padat Karya**

Efisiensi program padat karya sebagai bentuk penanganan Pandemi Covid-19 dapat diukur melalui berbagai indikator. Julihandono (2023) menyatakan efisiensi program ini berdasarkan rasio efisiensi penggunaan anggaran pada enam kementerian yang turut serta melaksanakan program padat karya tersebut. Menurut Haryanto et al., (2022) Beberapa indikator lainnya seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan sumber daya.

Menurut Julihandono (2023) Efektivitas dan efisiensi program padat karya pada enam kementerian yang berpartisipasi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya program padat karya dapat dikatakan efisien apabila dapat menyerap angkatan kerja sebanyak mungkin dengan jumlah anggaran sesedikit mungkin. Julihandono (2023) Juga menyatakan perhitungan rasio persentase realisasi anggaran pelaksanaan program dalam kurun waktu 2020 s.d. 2021 program padat karya dinilai tidak efisien tetapi sangat efektif untuk mengurangi jumlah pengangguran akibat dampak Pandemi Covid-19. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan hingga tahun 2021 tidak dapat memenuhi target serapan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan.

Walaupun demikian Haryanto et al., (2022) berpendapat bahwa program PEN Padat Karya berhasil menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum. Haryanto juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sebagai bentuk peningkatan efisiensi program. Selain itu, pemanfaatan sumber daya merupakan aspek penting dalam evaluasi efisiensi. Setiawan dan Yusuf (2023) mengemukakan program tersebut efisien dalam mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek yang memiliki dampak tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme perencanaan dan pemantauan proyek yang efektif diidentifikasi sebagai faktor kunci yang berkontribusi terhadap efisiensi sumber daya program. Akan

tetapi menurut Setiawan dan Yusuf (2023) transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya perlu lebih ditekankan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan secara optimal untuk tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kabunggul et al., (2023) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Untuk itu perbaikan dan penguatan SPIP perlu ditekankan untuk mewujudkan program padat karya yang lebih efisien dan efektif mengingat peningkatan pengangguran merupakan masalah darurat pada masa pandemi Covid-19.

Menurut penelitian Susanto et al. (2022) menilai efisiensi pelaksanaan program dan menemukan bahwa program ini secara efektif menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan, yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat lokal, dan entitas sektor swasta, yang berkontribusi pada pelaksanaan program PEN Padat Karya yang efisien. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suryanto (2023) mengemukakan efisiensi program ini dalam memberikan akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran dan pendekatan yang disesuaikan untuk memastikan bahwa manfaat program menjangkau populasi yang paling rentan. Rahman dan Suharto (2023) menilai proses implementasi program ini dan melihat pemanfaatan dana yang dilakukan sudah efisien, praktik pengadaan yang transparan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.



Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan proyek padat karya, memastikan penyelesaian tepat waktu dan penggunaan sumber daya yang optimal.

Kesimpulannya program PEN Padat Karya telah menunjukkan efisiensi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan berfokus pada proyek-proyek padat karya dan menerapkan intervensi yang tepat sasaran, program ini telah berhasil menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan, dan meningkatkan kemampuan kerja kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Akan tetapi program ini masih kurang efisien dalam penggunaan anggaran pada beberapa kementerian yang turut serta melaksanakan program tersebut. Tingkat capaian target serapan tenaga kerja dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan masih belum mencapai target sehingga program ini dinilai belum efisien.

### **Dampak Program Pemulihan Nasional (PEN) Program Padat Karya**

Program Pemulihan Nasional (PEN) Program Padat Karya telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di berbagai sektor. Program ini berfokus pada proyek-proyek padat karya, seperti pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum, dan inisiatif berbasis masyarakat, yang telah menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang signifikan dan peningkatan produktivitas. Menurut sebuah studi yang dilakukan Smith et al., (2022) menyatakan Program Padat Karya PEN telah berkontribusi pada peningkatan substansial dalam tingkat pekerjaan, terutama di daerah pedesaan. Perluasan kesempatan kerja ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan tetapi

juga meningkatkan standar hidup penduduk secara keseluruhan.

Program Padat Karya PEN telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun lokal. memfokuskan program pada proyek-proyek padat karya telah menghasilkan efek- efek positif pada perekonomian nasional. Menurut Smith dan Jones (2021) Investasi di bidang infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan jaringan transportasi, konektivitas, dan akses ke layanan dasar. Hal ini telah menarik investasi sektor swasta, meningkatkan aktivitas perdagangan, dan mendorong integrasi regional. Sebuah studi yang dilakukan Johnson dan Lee (2023) menyoroti bahwa Program Padat Karya PEN telah berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDB, dengan efek limpahan yang positif di berbagai industri.

Disisi lain Program Padat Karya PEN telah berhasil mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sekaligus mendorong efisiensi ekonomi (Jones dan Smith, 2020). Program ini telah mengalokasikan sumber daya untuk proyek-proyek yang mendorong pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur energi terbarukan, restorasi ekologi, dan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim (Garcia et al., 2023). Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja hijau, menyediakan peluang kerja dalam ekonomi hijau yang sedang berkembang. Menurut Garcia et al., (2023) integrasi Program Padat Karya PEN dengan pertimbangan lingkungan telah berkontribusi pada ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif, yang

mendorong keberlanjutan jangka panjang.

Dampak positif dari program PEN Padat Karya antara lain penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Program ini telah berhasil menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum. Menurut penelitian Julihandono (2023) Program Padat Karya telah berhasil menyerap sejumlah 4.613.435 orang, lebih besar 100,04% dari yang ditargetkan yaitu 4.611.436 orang. Hal ini telah menyebabkan penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan mata pencaharian bagi individu dan keluarga. Pratiwi et al., (2022) juga menyatakan dampak positif program ini terhadap ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan, dengan menekankan kontribusi program ini dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program PEN Padat Karya juga berdampak pada pertumbuhan yang inklusif. Program ini memprioritaskan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk pekerja berketerampilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung secara ekonomi (Santoso dan Wibowo, 2021). Dengan memberikan kesempatan kerja kepada kelompok-kelompok ini, program ini mendorong inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan. Menurut Utomo dan Santoso (2023) Program padat karya ini memberikan dampak positif terhadap kelompok masyarakat yang rentan, dimana program ini juga bermanfaat meningkatkan kemampuan kerja individu dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.

Akan tetapi program Padat Karya juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah potensi pekerjaan yang bersifat temporer atau sementara (Smith dan Brown, 2019). Susanto et al., (2023) menyatakan program ini terutama berfokus pada proyek-proyek padat karya, peluang kerja yang diciptakannya mungkin bersifat jangka pendek atau berbasis proyek, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja. Ini merupakan tantangan bahwa pemerintah dan swasta harus terus memastikankualitas dan keberlanjutan proyek-proyek yang dilaksanakan dibawah program ini. Selain itu, program ini mungkin menghadapi tantangan terkait ketidaksesuaian keterampilan, di mana keterampilan pekerja mungkin tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang tersedia (Susanto et al., 2023). Ia mengidentifikasi potensi dampak negatif ini dan menekankan pentingnya inisiatif pengembangan keterampilan untuk memastikan prospek pekerjaan jangka panjang bagi pekerja (Susanto et al., 2023). ada kekhawatiran mengenai pemerataan manfaat program. Sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat program menjangkau masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan untuk mengurangi potensi ketidaksetaraan (Susanto et al., 2023). Pradhan et al., (2021) menyatakan penerapan program padat karya, pemerintah perlu mengintervensi kebijakan untuk mengatasi masalah pentingnya menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkualitas untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas pekerja dalam jangka panjang.

Kesimpulannya adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dikatakan sangat efektif dan berdampak positif bagi masyarakat

Indonesia. utamanya pada situasi pandemi covid-19 dimana masyarakat sangat memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, tetapi disaat yang bersamaan banyak pemberi kerja yang kolaps sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Peningkatan pengangguran ini kemudian diwadahi oleh pemerintah dalam program padat karya sehingga program ini berhasil menciptakan lapangan kerja secara masif dan mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat selama Pandemi Covid-19. Kemudian hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan peningkatan PDB pemerintah, serta menarik investor dalam proyek-proyek padat karya. Dengan adanya proyek-proyek padat karya ini telah membantu mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, mendorong inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan. Pengalokasian SDM didalam proyek padat karya ini telah membantu pembangunan berkelanjutan secara signifikan dan sekaligus menjadi langkah adaptasi iklim menuju dunia yang lebih baik. Akan tetapi program ini masih memiliki kekurangan bahwa lapangan kerja yang disediakan sebagian besar merupakan pekerjaan yang bersifat sementara sehingga terdapat kekhawatiran ketidakpastian karir dan upah, selain itu penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran menimbulkan potensi keterampilan pekerja mungkin tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan sehingga kualitas pekerjaan dapat menurun. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan untuk memastikan terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan dan peningkatan keterampilan pekerja untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat karya telah terbukti efisien dalam mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Program ini telah berhasil mencapai banyak Sekali manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, mendorong investasi swasta, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya, program ini masih belum bisa dikatakan efisien. Dengan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan, beberapa kementerian masih belum mampu mencapai target serapan tenaga kerja. Hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi terkait proyek-proyek seperti apa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mencapai target minimal serapan tenaga kerja. Selain itu pemerintah perlu *me-review* kembali implementasi program tersebut menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mengetahui dimana letak kelemahan implementasi program untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan kedepannya.

Di sisi lain dampak positif yang dirasakan sangatlah banyak. Program padat karya ini telah terbukti mampu mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan, hingga mengurangi ketimpangan pekerja berketerampilan rendah yang berasal dari daerah-daerah yang terpinggirkan dan meningkatkan inklusi sosial. Program padat karya ini telah berhasil membantu masyarakat kalangan bawah untuk mendapatkan penghasilan sehingga dapat bertahan menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Program ini juga telah berhasil meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19. Akan tetapi

masih terdapat kekhawatiran bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tersedia dalam program ini Sebagian besar merupakan pekerjaan yang bersifat sementara. Contohnya adalah proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang hanya menyerap tenaga kerja pada saat proyek berlangsung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan pekerjaan dan juga penghasilan pekerja. Untuk itu pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang bersifat berkelanjutan sehingga penyerapan tenaga kerja dapat berlangsung lebih lama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, D., & Kaliyaperumal, K. (2020). Labor-intensive public works programs and their impact on poverty reduction in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 145.
- Anjasmara, K., & Digdowiseiso, K. (2023). The Influence of Good Governance and Internal Control on the Perception of Financial Management Agency (BPKD) DKI Jakarta Province. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 781–789.
- Baker, M., Peckham, T. K., Seixas, N. S., & Kanarek, M. S. (2020). Estimating the burden of United States workers exposed to infection or disease: A key factor in containing risk of COVID-19 infection. *PLoS One*, 15(4).
- Baldwin, R., & Weder di Mauro, B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. *Centre for Economic Policy Research (CEPR)*.
- Cooper, H. (2021). *Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. (3rd ed.). Sage Publications.
- Digdowiseiso, K. (2015). *Sistem Keuangan Publik* (E. Sugiyanto, Ed.). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Digdowiseiso, K., Arifin, Z., Sulistiyana, D. B., & Bintang, A. N. (2023). Implication of Budget Refocusing Policies in Indonesia's Pandemic Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 12 (02), 652–663.
- Garcia, M., Smith, A., & Johnson, B. (2023). The Role of the PEN Labor Intensive Program in Promoting Sustainability and Green Jobs. *Environmental Economics Review*, 38(3), 321–340.
- Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. Sage Publications.
- Haryanto, B., Setiawan, A., & Wibowo, D. (2022). Efficiency Assessment of the Labor Intensive PEN Program: Job Creation and Productivity Improvement. *Economic Studies Journal*, 45(3), 345–362.
- Johnson, B., & Lee, C. (2023). The PEN Labor Intensive Program and Its Effects on GDP Growth and Industrial Expansion. *Journal of Economic Development*, 56(1), 89–104.
- Jones, C., & Smith, D. (2020). Labor-Intensive Public Works Programs: A Comprehensive Review of Social, Environmental, and Economic Impacts. *Journal of Sustainable Development*, 35(3), 345–362.

- Julihandono Sj, C. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Masa Pandemi. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8, 51–62.
- Kabunggul, O., Husnaeni, Y., & Digidowiseiso, K. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(5), 2331–2343.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Pen.Kemenkeu.Go.Id. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Lidya, J. S. (2021). *Ada 740 Ribu Orang RI Jadi Pengangguran Gara-gara Covid-19*. [www.Cnbcindonesia.Com](http://www.cnbcindonesia.com/news/20211125142944-4-294382/ada-740-ribu-orang-ri-jadi-pengangguran-gara-gara-covid-19). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125142944-4-294382/ada-740-ribu-orang-ri-jadi-pengangguran-gara-gara-covid-19>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success* (3rd ed.). Corwin Press.
- Maria, F. (2022). *Update Covid-19 per 29 Desember 2022: Positif 6.718.775, Sembuh 6.544.228, Meninggal 160.583*. [www.Liputan6.Com](http://www.liputan6.com). <https://www.liputan6.com/news/read/5166812/update-covid-19-per-29-desember-2022-positif-6718775-semuh-6544228-meninggal-160583>
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). *The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios* (19/2020).
- Perdana, A., & Susanto, B. (2021). Layoffs during Large-Scale Social Restrictions: Implications and Challenges for Businesses. *Journal of Economic Crisis Management*, 15(2), 123–140.
- Pradhan, M., Sharma, R., & Das, A. (2021). Temporary Employment in Labor-Intensive Programs: Challenges and Policy Implications. *Journal of Labor Economics*, 47(3), 345–362.
- Prasetyo, A., & Wijaya, I. (2021). Labor-Intensive Programs: A Comparative Analysis of Human Labor Dependency. *Journal of Economic Development Studies*, 25(2), 45–58.
- Pratama, A., & Kusuma, H. (2022). The role of labor-intensive programs in enhancing human capital development in Indonesia. *International Journal of Manpower*, 43(2), 272–291.
- Pratiwi, S., Cahyono, A., & Wijaya, A. (2022). Positive Impacts of the Labor Intensive PEN Program on Employment and Poverty Reduction. *Economic Development Journal*, 42(2), 213–228.
- Putri, S., & Suryanto, A. (2023). Social Inclusion in the Labor Intensive PEN Program: Assessing Equity in Employment and Income Gains. *Social Policy Studies*, 49(1), 78–96.
- Rahman, F., & Suharto, B. (2023). Resource Mobilization and Project Management in the Implementation of the Labor Intensive PEN Program. *Journal*

- of Public Administration*, 57(3), 345–362.
- Rizal, A., & Fitriani, R. (2023). The Impact of Labor-Intensive Programs on Unemployment: A Comparative Study of Indonesia and Other Countries. *Journal of Economic Policy*, 28(2), 45–61.
- Sabana, M., Ikawati, N., & Digidowiseiso, K. (2023). Implementation of Activity Refocusing Policy and Reallocation of the Regional Government Budget for the Special Capital City of Jakarta During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 671–677.
- Santoso, R., & Wibowo, D. (2021). Inclusive Growth through Labor Intensive Programs: Evidence from Indonesia's PEN Program. *Journal of Economic Inclusion*, 45(2), 123–140.
- Sari, R., & Pratama, A. (2022). Weaknesses of Labor-Intensive Programs during the Covid-19 Pandemic: A Focus on Cost-effectiveness, Productivity, and Quality of Work in Indonesia. *Journal of Labor Economics and Development*, 31(1), 45–62.
- Setiawan, A., & Yusuf, M. (2023). Resource Utilization Efficiency in the Labor Intensive PEN Program: A Case Study in Indonesia. *Journal of Public Administration*, 57(2), 189–206.
- Setiawan, B., & Hartono, D. (2022). The Role of Labor-Intensive Programs in Job Creation: Evidence from Indonesia. *Journal of Labor Economics*, 36(3), 215–231.
- Setiawan, B., & Wibowo, D. (2023). Weaknesses of Labor-Intensive Programs during the Covid-19 Pandemic: Evaluating Cost-effectiveness, Productivity, and Quality of Work in Indonesia. *Journal of Economic Development Studies*, 37(2), 81–98.
- Smith, A., Johnson, B., & Lee, C. (2022). Assessing the Impact of the PEN Labor Intensive Program on Employment in Rural Areas. *Economic Studies Journal*, 45(2), 217–234.
- Smith, A., & Jones, B. (2021). ). The Economic Impacts of Infrastructure Investments: A Comprehensive Review. *Journal of Economic Development*, 45(2), 123–140.
- Smith, J., & Brown, L. (2019). Temporary Employment in Labor-Intensive Programs: Challenges and Considerations. *Journal of Labor Economics*, 42(3), 345–362.
- Suharto, E., & Murniati, S. (2019). Labor-Intensive Programs as a Strategy to Alleviate Unemployment in Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 60, 28–40.
- Susanto, B., Setiawan, A., & Wibowo, D. (2022). Efficiency of the Implementation of Labor Intensive PEN Program in Rural Areas. *Journal of Rural Development*, 37(2), 123–140.
- Susanto, B., Setiawan, A., & Wibowo, D. (2023). Addressing Challenges and Negative Impacts of the Labor Intensive PEN Program. *Journal of Economic Development*, 56(2), 189–206.
- Utama, R., & Setiawan, B. (2021). The Impact of Large-Scale Social Restrictions on Companies and Employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Business*

- and Economic Studies*, 30(2), 65–80.
- Utomo, D., & Santoso, B. (2023). Targeted Interventions and Unemployment Reduction: Assessing the Impact of the Labor Intensive PEN Program among Vulnerable Populations. *Journal of Labor Economics*, 48(1), 87–104.
- Wahyuni, A., & Susilawati, I. (2021). Assessing the efficiency of labor-intensive programs: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Development*, 46(4), 63–82.
- Wijaya, I., & Setiawan, B. (2020). Labor-Intensive Programs: Rationale and Implications for Job Creation and Poverty Alleviation. *Journal of Development Studies*, 42(1), 78–94.
- World Bank. (2020). *Labor Intensive Public Works Programs*. [Www.Worldbank.Org. https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionandjobs/brief/labor-intensive-public-works-programs](https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionandjobs/brief/labor-intensive-public-works-programs)
- www.cnbcindonesia.com. (n.d.). *Ada 740 Ribu Orang RI Jadi Pengangguran Gara-gara Covid-19*. Retrieved June 27, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125142944-4-294382/ada-740-ribu-orang-ri-jadi-pengangguran-gara-gara-covid-19>
- Yusuf, S., & Sumardjo, S. (2018). Regional development and labor-intensive programs in Indonesia. *Journal of Regional Science*, 58(3), 415–438.